

MENGURAI PERISTIWA 1998, KONFLIK ANTAR KELOMPOK
PENGHUNI PERUMNAS BTP MAKASSAR
(FIGTHING INTERGROUP
AT BUMI TAMALANREA PERMAI (BTP)
HOUSING MAKASSAR)

Syamsul Bahri, Hasmah, Raodah

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
syamsulbahrihabibi@yahoo.co.id

Abstract

Fighting among community groups in urban areas is no longer a new problem that should be faced by the community as city inhabitants and the city government as ruler and policy maker. But the issue of fights between community groups has become part of the complexities of city life, so it must be accepted as a reality. Fights between groups in urban communities, such as in Makassar City, do not have to occur in densely populated and slum settlements due to not being well organized, but also occur in residential environments that grow and are built with regular arrangement, as is the case in "BTP" (Bumi Tamalanrea Permai) Housing, which is one of the many settlements that grow in the city of Makassar. BTP with its plurality of inhabitants certainly is undeniable that there is a grouping. Whether it is among ethnic groups, nationalities and religions (race), including the compartmentalization of regions of origin. Such environmental conditions caused the years to end in 1990-1n and early 2000s, at the Bumi Tamalanrea Permai housing conflict broke out in the nature of fights between community groups in which religion was used as a group differentiator. This event was quite alarming because, in addition to bloodshed, also the direction to the destruction of house buildings.

Keywords: *Fighting, groups, BTP.*

Abstrak

Perkelahian antar kelompok masyarakat dalam wilayah perkotaan bukan lagi merupakan masalah baru yang mesti dihadapi oleh masyarakat sebagai penghuni kota dan pemerintah kota sebagai penguasa serta pengambil kebijakan. Tetapi persolan perkelahian antar kelompok masyarakat sudah menjadi bagian dari liku-liku kehidupan kota yang terbilang kompleks, sehingga harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Perkelahian antar kelompok dalam masyarakat perkotaan, seperti halnya di Kota Makassar tidak mesti terjadi di lingkungan pemukiman penduduk yang terbilang padat dan kumuh akibat tidak tertata dengan baik, tetapi juga terjadi di lingkungan pemukiman yang tumbuh dan terbangun dengan design penataan yang teratur, seperti halnya yang terjadi di Perumahan "BTP" (Bumi Tamalanrea Permai), yaitu satu di antara sekian banyak pemukiman yang tumbuh di Kota Makassar. BTP dengan kemajemukan penghuninya tentu tidak dipungkiri terjadi pengkotak-kotakan. Baik itu antar suku, bangsa dan agama (RAS), termasuk pengkotak-kotakan antar daerah asal. Kondisi lingkungan seperti inilah sehingga akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, di perumahan Bumi Tamalanrea Permai pecah konflik yang sifatnya perkelahian antar kelompok masyarakat di mana agama sudah dijadikan pembeda kelompok. Peristiwa ini cukup memprihatinkan karena, selain terjadi pertumpahan darah, juga terjadi pengrusakan bangunan rumah.

Kata Kunci: Perkelahian, kelompok, BTP.

PENDAHULUAN

Fenomena perkotaan tidak dipungkiri hadirnya berbagai problem, mulai dari persoalan kemacetan akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak lagi seimbang dengan penambahan volume jalan; masalah sampah yang penanganannya belum mampu ditangani secara profesional sehingga setiap tahunnya menjadi beban pemikiran pemerintah kota; masalah kepadatan penduduk akibat kota dijadikan sasaran masyarakat dari berbagai daerah menggantungkan hidupnya, baik hidup untuk menetap maupun sifatnya sementara sehingga sebuah kota tentu menjadi padat penduduk; masalah ketertiban dan keamanan lingkungan akibat tumbuhnya bangunan-bangunan rumah penduduk yang tidak tertata dengan baik sehingga terlihat tumbuh pemukiman-pemukiman yang kumuh; masalah kemajemukan akibat hadirnya masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dengan latar suku, bangsa dan agama yang berbeda satu sama lainnya, sehingga terkadang melahirkan apa yang diistilahkan kecemburuan sosial. Semua masalah yang disebutkan sebelumnya satu sisi dapat memperkuat ketahanan sebuah Negara dan memperkaya khazanah budaya. Tetapi pada sisi lain semua yang disebutkan kandungannya menjadi benih-benih pemicu lahirnya perkelahian kelompok atau juga disebut konflik.

Tetapi yang lebih memperhatikan beberapa tahun terakhir ini, terkait dengan masalah keberagaman penduduk. keberagaman yang bersumber dari perbedaan asal daerah ini dapat terkait dengan pembagian wilayah administrasi; perbedaan suku bangsa dan perbedaan agama. Perbedaan semacam ini sebenarnya pada satu sisi akan memiliki kekuatan untuk mendukung terciptanya sebuah negara kesatuan yang kuat ketika berbicara dalam skop yang lebih luas (Sani, 2006) dan lingkungan perumahan atau wilayah tertentu ketika kita memaknainya ke arah yang lebih sempit.

Sehingga dengan keberagaman tersebut tentu akan menambah pengayaan khazanah budaya sebuah lingkungan pemukiman. Tetapi pada sisi lain, persoalan kemajemukan penduduk suatu Negara justru menjadi benih-benih pemicu terjadinya disintegrasi bangsa. Seperti karena perbedaan suku bangsa dan agama belakangan ini justru dijadikan isu pemicu utama konflik. Sebab menurut Fisher, dkk (dalam Kinseng, 2014:12), konflik dikatakannya adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran tidak sejalan. Lain lagi yang dikatakan Fruitt dan Rubin dalam tulisan yang sama (dalam Kinseng, 2014) yang mengatakan, bahwa konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Bahkan Kinseng dalam sebuah tulisannya mengatakan, bahwa konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing (Kinseng, 2013).

Keterkaitan masalah ini, agama yang secara etimologis berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun (Anshari, 1983:2-5). Melalui pendekatan yang sama, Parsons mengatakan: "*A religion we will define as a set beliefs, practices and institution wich man have avalved in various societies*" (Atkinson dalam Kipp and Rodgers, ed., 1982: 174-175). Hal ini mengandung arti bahwa agama merupakan seperangkat kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan serta lembaga-lembaga yang dapat ditemukan dalam berbagai kelompok masyarakat.

Keterkaitannya dengan kajian Adaptasi yang berarti menyatunya berbagai elemen masyarakat melalui sebuah proses yang berlangsung cukup panjang dan sering dibarengi dengan torehan-torehan yang berwujud sebagai sebuah tantangan, oleh Bennett (dalam

Hijang, 2004:12) dikatakan, bahwa adaptasi merupakan perilaku responsive manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungannya yang memungkinkan mereka dapat menata sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah lakunya agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam tulisan yang sama, Sahlins mengatakan, bahwa adaptasi merupakan suatu proses di mana suatu kategori individu berusaha memaksimalkan kesempatan hidupnya.

Dikatakan seperti ini oleh karena orang-orang yang menjadi penghuni perumahan ini adalah kelompok orang yang berasal dari berbagai daerah tingkat II atau kabupaten/kota, bahkan tidak dipungkiri banyak juga yang datang dari berbagai daerah luar Sulawesi dengan latar belakang suku bangsa yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya sehingga saya berani mengatakan pemukiman ini adalah “Kota Mini” yang ada dalam wilayah Kota Makassar. Mereka yang datang dengan membawa berbagai identitas yang melatari kehidupan masing-masing kelompok, seperti halnya asal daerah, suku bangsa, serta agama yang dianutnya. Kondisi seperti inilah yang menjadi pendukung lahirnya berbagai bentuk aktivitas masyarakat, khususnya hadirnya beragam jenis jualan makanan/jajanan khas daerah yang siap saji dan boleh dikatakan tersedia 24 jam.

Kondisi keragaman penduduk kota atau disebut masyarakat mukti-kultur yang dilihat dari berbagai latar belakang sosial budaya justru merupakan salah satu pemicu hadirnya persaingan yang tidak sehat dalam hidup bermasyarakat, walau tidak dipungkiri adanya penyebab lain, seperti di antaranya persoalan kenakalan remaja yang modus perkelahiannya hampir tidak membawa atau mengatasnamakan kedaerahan, kesukuan, agama, tetapi terjadinya perkelahian umumnya mengatasnamakan sekolah, blok-blok jika terjadi perkelahian dalam lingkungan perumahan, dan pemicunya pun hanya masalah sepele, seperti saling ejek mengejek, persaingan merebut kekasih, termasuk akibat tersenggol baik saat berjalan maupun saat berkendara, termasuk pengaruh minuman keras.

Masalah perkelahian khususnya yang ditemukan di Kota Makassar, bukan lagi masalah yang terbilang baru, tetapi sudah menjadi sebuah ajang yang setiap saat terjadi dan harus diterima sebagai sebuah kenyataan oleh pemerintah kota. Sebab ada titik-titik tertentu wilayah pemukiman masyarakat sudah tercatat dalam peta rawan konflik, artinya sudah diberi garis merah bahkan sudah menjadi target operasi khusus bagi tim pengamanan. Dalam beberapa peristiwa perkelahian yang sering muncul dalam berita-berita media cetak (Koran) dan visual (Televisi), seperti di wilayah Bara-barayya sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hamid, 1998/1999), daerah Tamamau yang tertuang dalam berita di media televisi dan media cetak, daerah Rappo Kalling, daerah Balang Baru, termasuk yang terjadi di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP).

Salah satu sasaran yang menarik dijadikan kajian mengenai perkelahian antar kelompok di Kota Makassar, adalah di wilayah Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, yang disingkat BTP. BTP sebagaimana disebutkan, merupakan salah satu kompleks perumahan yang terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI), baik dilihat dari besaran jumlah bangunannya, juga jumlah penduduknya cukup besar, bahkan karena besaran jumlah penduduknya dua tahun terakhir ini, warga masyarakat BTP dibagi menjadi dua wilayah keluarahan, yaitu Keluarahan Tamakanrea dan Kelurahan Buntusu. Penduduknya pun multi-kultur yang mana diketahui tidak hanya datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, tetapi datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Keberagaman penduduk perumahan Bumi Tamalanrea Permai, awal-awal berdirinya, penduduknya memang terjalin hubungan yang harmonis karena saat itu

sekitar tahun 1992 mereka bersatu melawan orang-orang jahat yang sering melakukan pencurian di wilayah perumahan ini, dengan cara membangun pos-pos Kamling di setiap RW/RT atau ronda keliling. Namun setelah kondisi keamanan lingkungan semakin membaik, orang-orang luar kampung tidak lagi mengganggu, maka benih-benih konflik antar warga sudah mulai terlihat. Artinya kelompok yang merasa besar atau dominan dalam jumlahnya mau menguasai yang minoritas. Penduduk yang dominan baik latar belakang kedaerahan atau suku bangsa, termasuk penganut agama ingin menguasai penduduk yang kecil jumlahnya. Kedaan seperti inilah sehingga di BTP akhir tahun 1990-an atau sekitar tahun 1998 terjadi perkelahian antar kelompok yang sudah menjadikan agama sebagai sebuah isu pertentangan/persaingan (Muslim dengan Non-Muslim). Jadi perkelahian yang terjadi tidak lagi mengatasnamakan siapa dia, dari daerah mana dia, tetapi sudah pada wawasan mengedepankan sifat keegoisan sebagai penganut agama dominan dengan melakukan intimidasi terhadap penganut agama Non-Muslim dengan latar belakang asal daerah berbeda.

PEMBAHASAN

Karakteristik 'Kedaerahan' di Kota Makassar

Sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar tak ayal didapuk menjadi kota tujuan migrasi penduduk yang menginginkan urbanisasi. Setiap tahun kepadatan penduduk semakin meningkat akibatnya meningkatnya jumlah kelahiran populasi yang ditambah peningkatan jumlah kedatangan penduduk yang berasal dari luar kota. Belakangan penduduk yang masuk ke Kota Makassar tersebut lebih sering disebut 'orang daerah'. Sementara itu pemerintah kota terus meningkatkan pembangunan untuk menopang perkembangan penduduk. Dimulai dengan pembangunan infrastruktur, kawasan perindustrian, perdagangan, pariwisata dan pengembangan sektor informal. Karena itu Makassar mendeklarasikan diri sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan timur Indonesia. Dalam waktu dekat, wacana sebagai kota dunia terus dikejar oleh pemerintah kota sebagai salah satu capaian prestisius. Namun demikian, bukan berarti Kota Makassar tidak menyimpan pelbagai polemik dan dinamika masyarakat yang salah satunya adalah mengenai masalah kekerasan dan konflik yang dilatari oleh kompleksitas penduduk pendatang di Kota Makassar.

Kelompok pendatang dari pelbagai wilayah lain menyasar Kota Makassar terutama karena motif peningkatan ekonomi. Kehidupan yang lebih layak dianggap dapat dipenuhi di Kota Makassar. Kelompok pendatang ini yang pada dasarnya membawa latar belakang etnik misalnya orang dari wilayah Bugis, Toraja, Mandar, Massenreplulu (Enrekang) dan sub-etnik lainnya yang awalnya mendiami dataran Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, pendatang dari wilayah yang lain seperti dari Buton, Bima, Sumbawa, Flores, Maluku dan Papua, termasuk suku bangsa Jawa dan lainnya. Kesemua kelompok pendatang seperti disebutkan masih tetap merupakan kelompok masyarakat yang hadir dengan keminoritasannya.

Komposisi penduduk berdasarkan latar etnik yang beragam tersebut membentuk Kota Makassar menjadi salah satu kota heterogen. Apa yang ada didalamnya adalah entitas-entitas dari asal daerah budaya tertentu yang saling berkorelasi. Oleh karena itu corak multikultural penduduk Kota Makassar nampak begitu kentara. Namun demikian potensi konflik membayangi keragaman tersebut yang juga justru menimbulkan semacam segregasi di wilayah-wilayah pemukiman. Tidak jarang dinamika penduduk Kota Makassar menunjukkan konflik-konflik komunal baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Demikian konsekuensi yang harus ditanggung oleh kota besar seperti Makassar dengan

memperhatikan tingkat heterogenitas penduduknya. Konflik-konflik tersebut secara masif diangkat di media dan pelbagai kajian akademik sebagai konflik SARA (suku bangsa dan agama).

Makassar pada awalnya adalah bekas kerajaan dan juga bekas koloni penjajahan Belanda yang menjadikan pusat pelabuhan pada masa itu. Sehingga sejak dari awal Makassar bertumbuh telah cukup terbuka terhadap pendatang yang memang pada saat itu yang dikembangkan adalah perdagangan di kawasan timur nusantara. Etnik Makassar masih merupakan mayoritas sebagai penduduk asli yang mendiami Makassar sejak dahulu. Etnik Makassar ini yang awalnya memiliki tradisi maritim yang cakap sehingga mampu mengembangkan pelabuhan sebagai pusat perdagangan (Poelinggomang, 2002). Wilayah ini teridentifikasi didiami oleh etnik Makassar antara lain Gowa, Takalar, Jene-ponto, Bantaeng dan sebagian Selayar dan Maros. Lalu diikuti oleh etnik Bugis dari dataran tengah Sulawesi antara lain saat ini merupakan wilayah Bone, Soppeng, Wajo, sebagian Luwu, Sidenreng-Rappang, Pinrang, Pare-pare, Barru, Pangkep, Sinjai dan Bulukumba. Pada awalnya orang-orang Bugis merupakan masyarakat yang bercorak agraris yang kemudian banyak yang beralih menjadi pelayar untuk kepentingan berdagang (Pelras, 2006). Kemampuan orang-orang Bugis dalam berdagang saat itu turut berkontribusi dalam perkembangan kota pelabuhan Makassar saat itu.

Pendatang berikutnya yang turut meramaikan dan mengembangkan kota pelabuhan Makassar yakni orang-orang pendatang dari Melayu yang juga memiliki corak tradisi maritim yang kuat. Kemudian pendatang dari Tiongkok yang sejak era kolonial mendiami kota pelabuhan Makassar. Peran orang-orang Melayu dan Tiongkok ini tidak bisa dinafikan karena cukup berkontribusi dalam perkembangan kota pelabuhan Makassar pada saat itu. Orang-orang Melayu dipercaya sebagai syahbandar karena kemampuan mereka dalam mengelola aktifitas perdagangan di pelabuhan. Sementara orang-orang Tiongkok menunjang aktifitas kepelabuhanan dengan berperan sebagai pedagang.

Etnik Mandar juga memiliki tradisi yang kuat karena itu pendatang-pendatang awal telah mendiami kawasan pulau-pulau dan pesisir di sebelah barat Kota Makassar. Pelabuhan Paotere yang saat ini menjadi salah pelabuhan rakyat di Makassar ditengarai dahulu pernah menjadi pusat pemukiman orang-orang pendatang dari Mandar. Orang dari Mandar datang dari pesisir barat Sulawesi Selatan, di bagian utara Makassar. Umumnya mata pencaharian mereka berkulat sebagai nelayan tangkap. Sementara yang datang dari arah timur laut Sulawesi Selatan orang-orang yang berasal dari Luwu yang lebih dikenal saat ini sebagai orang Palopo. Meskipun saat itu Palopo juga merupakan pusat kerajaan dan berkembang menjadi kota, tapi Makassar tetap menarik sebagai pusat kota besar. Wilayah yang subur di Luwu dengan hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah menjadi salah satu komoditas yang menggiring mereka masuk ke Kota Makassar.

Dari pegunungan tengah Sulawesi Selatan, etnik Toraja selain memiliki corak agrikultural juga sampai saat ini memegang teguh tradisi peninggalan leluhur mereka. Kepercayaan terhadap tradisi leluhur yang oleh mereka disebut *Aluk Todolo*. Namun demikian sejak era kolonial hingga hari ini masyarakatnya lebih banyak menganut agama (Kristen dan Protestan). Kelompok ini dikenal memiliki solidaritas yang cukup kuat karena banyak dipengaruhi oleh adat dan sistem kekerabatan mereka. Di Kota Makassar, orang Toraja dengan mudah diidentifikasi karena kecenderungan mereka masih menggunakan atribut-atribut tradisional dalam arsitektur rumah yang mereka diami di Makassar. Orang Toraja merupakan penduduk dominan yang menganut agama Kristen dan Protestan di Kota Makassar. Karena itulah, kelembagaan keagamaan seperti gereja sering

disebut dengan Gereja Toraja-Mamasa mengikuti etnik asal. Namun demikian, Kota Makassar masih didiami oleh Mayoritas kelompok agama Islam yang berasal dari etnik Makassar, Bugis, Mandar, dan Luwu/Palopo. Sehingga tetap konflik SARA yang terjadi cenderung melibatkan komunitas orang Toraja sebagai kelompok yang berseberangan dengan mayoritas pemeluk agama Islam di Kota Makassar.

Konflik horizontal yang sering terjadi di Makassar umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda dan mahasiswa, sebut saja beberapa daerah yang sering terlibat konflik seperti, Palopo (Luwu Raya), Bone, Bulukumba, Jene-ponto, dan sesekali Bima. Beberapa daerah tersebut merupakan daerah asal mayoritas masyarakat kota Makassar, utamanya kalangan pemuda dan mahasiswa. Masyarakat pendatang dari daerah-daerah tersebut cukup berimbang, sehingga tidak terlihat adanya kelompok yang dominan, hal tersebut ternyata justru meningkatkan gengsi dan sikap fanatisme kedaerahan, sehingga terkadang menjadi pembakar api konflik karena masing-masing merasa sebagai kelompok mayoritas. Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik komunal ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi pemicu utama konflik adalah perkelahian antar pemuda atau mahasiswa yang kadang merupakan konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah, selain kerugian material, konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban jiwa (Nasurung, 2012).

Konflik Antar Kelompok Penghuni Komplek Perumahan

Komposisi penduduk yang menghuni komplek Perumnas mengarah pada pengelompokan yang berlatar etnik (daerah asal) dan agama. Kondisi demikian mencerminkan keragaman dan variasi penduduk berdasarkan latar warga penghuni Perumnas BTP. Sehingga dengan kecenderungan demikian memiliki potensi konflik yang muncul dari pelbagai perbedaan identitas, ideologi dan nilai-nilai budaya yang merupakan manifestasi dari latar etnik maupun agama. Tulisan ini mengurai bentuk konflik dan pertikaian (disputes) yang terjadi di lingkungan Perumnas BTP pada tahun 1998. Konflik yang sering kelihatan memiliki pola dan berulang setiap kali muncul dengan pemicu yang sama.

Identitas yang berlatar etnik di Perumnas BTP pada umumnya diikuti dengan konsepsi teritorial oleh kelompok-kelompok yang berlatar etnik tersebut. Kelompok pemuda di kawasan tersebut nampak lebih dominan dalam urusan membangun kolektifitas berdasarkan etnik yang kemudian mulia menarik garis batas imajiner dari konsepsi teritori yang berdasarkan blok perumahan di lingkungan BTP. Blok hunian inilah yang tumbuh menjadi basis yang belakangan dikonstruksi sebagai wilayah kekuasaan. Lingkungan yang homogen dengan latar etnik dalam satu blok hunian menjadi pemicu pembagian ruang kekuasaan teritorial. Karena itu, ruang teritorial tersebut diperlakukan secara tertutup dan eksklusif. Dimana aksesibilitas dibangun berdasarkan nilai-nilai kesamaan identitas yang homogen tersebut.

Kepadatan dan entitas karakteristik penghuni blok-blok perumahan dalam kompleks Perumnas BTP, justru berkontribusi dalam permasalahan potensi konflik. Semakin banyak penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu, semakin banyak masalah yang muncul, dan efek negatifnya pun semakin bertambah. Banyak stimulan yang mempengaruhi kognisi dan ini mempengaruhi proses-proses yang terjadi di dalam pikiran orang untuk bersengketa. Apalagi dalam kehidupan sosial yang semakin kompetitif, keserasian sosial semakin sulit terbentuk (Evans, 1982 dalam Sani, 2006)

Jika sebuah konflik antar pribadi yang belum diselesaikan tuntas, tidak menutup

kemungkinan salah satu pihak menyimpan bara dendam sehingga memberi peluang terjadinya konflik kekerasan yang lebih besar. Dalam konflik ini identitas diri (*self identity*), dan daerah asal terkait, sehingga dapat melibatkan masing-masing massa secara besar-besaran. Perkelahian, bukan lagi hanya mengandalkan tangan kosong, tetapi telah menggunakan peralatan perang, seperti parang panjang, tombak, panah, dan senjata rakitan. Selama beberapa waktu sejak Perumnas BTP terbangun, dominasi kelompok pemuda Toraja di kompleks perumahan tersebut demikian terasa. Hal ini disebabkan, populasi orang Toraja penghuni BTP saat itu relatif besar. Namun demikian yang lebih meresahkan adalah solidaritas antar warga Toraja demikian tinggi, sehingga jika salah seorang warga mengalami masalah, apalagi yang menjadi lawan adalah non Toraja, maka dapat dipastikan rumah lawan mereka itu akan menjadi sasaran penyerbuan.

Sementara itu di kalangan pemuda Bugis-Makassar yang menghuni Perumnas BTP, bukannya tidak ada yang mau melakukan perlawanan. Tetapi agaknya, mereka tidak mampu membangun solidaritas, sehingga kekuatan mereka terpecah dalam bentuk solidaritas daerah asal. Namun demikian, fenomena ini kemudian berubah. Bermula, ketika ada kegiatan pembangunan pada malam hari di sebuah hamparan lahan kosong yang sebenarnya diperuntukkan untuk sarana taman dan sarana olahraga bagi warga Perumnas BTP. Lahan kosong tersebut pernah diusulkan oleh tokoh masyarakat Islam setempat untuk mendirikan masjid, tetapi ditolak oleh manajemen Perumnas. Berselang beberapa lama kemudian, tampak kesibukan para pekerja membangun fondasi dan itu dilakukan pada malam hari. Hal ini sudah tentu menimbulkan tanda tanya dari beberapa warga. Setelah warga muslim mengetahui bahwa yang akan dibangun itu adalah "Gereja Toraja", ternyata meresahkan warga muslim setempat. Bahkan isu ini demikian cepat menyulut emosi keagamaan yang kemudian menjadi pemicu terbangunnya solidaritas sosial yang demikian kuat di antara penganut agama Islam yang umumnya berasal dari etnis Bugis-Makassar.

Atribut-atribut yang menyimpan simbol kedaerahan dan etnisitas lebur dalam identitas agama. Dan solidaritas Islam ini semakin diperkokoh oleh dukungan para anggota Jamaah Tablig yang dalam beberapa tahun turut memengaruhi aktifitas keagamaan di Perumnas BTP. Peralatan perang, seperti parang panjang, tombak, busur panah, senjata rakitan dan bom rakitan dihimpun, untuk melakukan penyerangan dan perusakan pada simbol-simbol agama Kristen. Bangunan gereja yang baru saja dimulai dibongkar paksa, kemudian penyerangan dilakukan ke kubu pemuda Toraja yang diketahui menjadi biang keonaran.

Solidaritas Islam dengan cepat pula ditanggapi oleh mahasiswa mahasiswa yang tersulut kesamaan identitas sebagai sesama Muslim yang berdomisili di pondokan-pondokan sekitar Universitas Hasanuddin, dan ini memperparah situasi. Sebuah gereja dengan sarana pendidikan serta sebuah wisma yang berada di pertigaan jalan masuk UNHAS (Universitas Hasanuddin) menjadi sasaran. Gereja, sekolah dan wisma tersebut dibakar. Demikian pula gereja Ballalompoea dipertigaan jalan masuk ke Perumnas BTP juga hampir menjadi sasaran pembakaran, tetapi cepat dipadamkan oleh aparat keamanan yang sudah melakukan pengamanan di tempat itu.

Kasus Perumnas BTP tahun 1999 menyentak kesadaran kita, betapa isu agama dapat demikian sensitif, sehingga demikian cepat membakar semangat perlawanan masyarakat Islam yang berdomisili di Perumnas tersebut. Padahal sebelumnya, mereka terpecah dalam kelompok-kelompok sosial daerah asal, sehingga tidak cukup kuat membangun solidaritas sosial. Orang Bugis-Makassar yang berdomisili di Perumnas BTP, sebagian besar termasuk golongan Muslim yang berafiliasi dengan kelompok "*Ahlussunnah*

Wal Jamaah" atau atau lebih dikenal sebagai kelompok muslim tradisional. Pandangan golongan Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap golongan Islam lainnya, bahkan terhadap golongan non Islam, tidaklah ekstrim. Mereka cenderung mengakomodasi pandangan-pandangan golongan Islam lainnya tanpa kecenderungan untuk mempersalahkannya. Bahkan dalam menyikapi masyarakat Islam yang masih menjalankan tradisi leluhur mereka yang biasa dilakukan oleh orang-orang kampung, mereka menyikapinya tampak lebih bijaksana.

Organisasi muslim lainnya yakni Muhammadiyah menunjukkan sikap moderat dan dinamis dalam menegakkan agama Islam. Meskipun pada masa-masa awal terbentuknya ormas ini, perjuangan menegakkan agama Islam dilakukan secara kontra tradisional dengan melarang semua bentuk tradisi yang dapat membuat orang menjadi musyrik. Saat ini aktifitas Muhammadiyah dilalui melalui pengembangan pendidikan dan pengajian-pengajian kelompok. Di Perumnas BTP, golongan Muhammadiyah, bahkan terkesan moderat sebagaimana golongan Islam lainnya, sehingga antara golongan Muhammadiyah yang dikenal sebagai Islam modern, tidak pernah terlibat pertentangan (*disputes*) apalagi dengan konflik golongan Islam lainnya yang dikenal tradisional. Dalam sebuah masjid, mereka menjalankan ibadah bersama, sehingga perbedaan hilafiah tidak menjadi persoalan. Pada bulan Ramadhan misalnya, golongan Muhammadiyah yang tarwih bersama, menyelesaikan shalatnya akan berhenti, ketika rakaat ke delapan usai, sementara golongan Islam yang mengidentifikasi sebagai Ahlussunnah Wal Jamaah, yang umumnya orang-orang NU, melanjutkan tarwih mereka.

Kelompok Islam yang baru beberapa tahun belakangan ini muncul adalah "Jamaah Tabligh". Jamaah Tabligh, juga merupakan jamaah Islamiah yang memiliki kecenderungan untuk berda'wah atau menyampaikan pesan-pesan (tabligh) kepada setiap orang yang dapat dijangkau. Karena itu, kadang-kadang dalam kelompok kecil, mereka bertabligh ke rumah-rumah penduduk, mengajak mereka untuk shalat berjamaah di masjid. Ketika terjadi konflik kekerasan bernuansa SARA antara warga yang beragama Islam dengan orang-orang Kristen Toraja di Perumnas BTP, anggota Jamaah Tabligh ini justru didorong oleh keyakinan dan pandangan jihad dalam Islam.

Konflik bernuansa agama yang menyulut emosi keagamaan dan kemudian mengobarkan semangat solidaritas Islam, sebenarnya bukan murni konflik agama. Dari hasil wawancara terungkap, bahwa: Konflik bernuansa agama, lebih bermuatan balas dendam akibat sepak terjang oknum-oknum anak muda Toraja yang dinilai sangat mengganggu masyarakat akibat mabuk-mabukan, yang terkadang disertai ancaman dan tindakan destruktif. Penilaian sebagian orang Islam terhadap kegiatan orang Kristen yang cenderung eksklusif, sehingga ditafsirkan, bahwa orang-orang Kristen melakukan ekspansi secara terselubung dalam komunitas Islam. Ketidakmampuan pemimpin formal (pemerintah lokal) termasuk aparat keamanan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik. Kebijakan pemerintah kota yang dinilai diskriminatif, dan tidak mempertimbangkan dampak sosial, berkenaan dengan izin pembangunan sarana ibadah. Konflik sosial dapat ditafsirkan sebagai gangguan daya tampung sosial yang menimbulkan perilaku adaptive dari kelompok tertentu. Dari perspektif Islam, "keberadaan bermacam-macam agama dan tempat ibadah merupakan kehendak Tuhan untuk menciptakan keseimbangan hidup manusia di bumi". Keseimbangan itu harus tercipta agar masyarakat menjadi dinamis dan dapat berkembang. Oleh karena itu, upaya penghancuran suatu komunitas simbol-simbol agama merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Pluralisme keagamaan adalah salah satu improvisasi yang menonjol dari pemikiran pembaruan Nurcholish Madjid (1995). Gagasan ini terutama berintikan pengakuan terhadap

eksistensi agama-agama lain dan perlunya meningkatkan saling pengertian dan menjalin hubungan-hubungan yang toleran di antara pemeluk agama-agama.

Dari perspektif Gereja Katolik dikatakan, "dialog dengan saudara-saudara dari agama-agama lain merupakan bagian integral penghayatan Injil sendiri". Injil sendiri mengajak orang Kristiani untuk berdialog, untuk belajar dari pengalaman umat beragama lain, untuk menghormati dan mencintai mereka, serta untuk bersama dengan mereka membangun kehidupan masyarakat yang baik, adil, damai dan sejahtera (Franz Magnis-Suseno, 2001). Kedua pernyataan tokoh agama di Indonesia tersebut, menegaskan posisi agama terhadap masalah kerukunan hidup antar umat beragama, bahwa agama sesungguhnya membawa misi untuk menciptakan kehidupan yang damai sejahtera di bumi. Dalam versi Islam disebutkan sebagai rahmatan lil 'alamin atau rahmat bagi alam semesta. Karena itu, Komaruddin Hidayat (2000), menyatakan setiap terjadinya konflik antar umat beragama, kita mengalami kesulitan untuk menemukan akar tunggang yang merupakan akar pokok penyebabnya. Bahkan penyebab utamanya seringkali berakar, bukan pada aspek doktrin yang merupakan inti agama, melainkan pada akar serabut non teologis, terutama pada persaingan politik, ekonomi dari para elit pemimpinnya.

Akibat dari ketidaksungguhan memecahkan masalah kerukunan antar umat beragama, muncullah kemudian sikap-sikap eksklusifisme, partikularistis, etnosentrisme, prejudis dan solidaritas berlebihan yang tidak rasional sebagai pemicu timbulnya konflik. Sikap ini kemudian diperparah oleh adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif, dan rendahnya penegakan hukum. Konflik bernuansa agama yang terjadi di Perumnas BTP, tahun 1999 mengakibatkan hancurnya belasan rumah, pembakaran gereja dan sarana pendidikan Kristen Toraja, jelas penyebab awalnya sama sekali bukan karena doktrin normatif agama. Di Perumnas BTP, umat beragama bebas menjalankan agamanya masing-masing, termasuk dalam merayakan hari-hari besar keagamaan. Tetapi penyebabnya karena masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya (*different value*) sebagaimana telah diungkapkan terdahulu.

Penyebab lain karena kebijakan pemerintah kota yang dinilai diskriminatif, ditandai dengan munculnya izin pembangun gereja pada lahan yang sedianya diperuntukkan sebagai taman dan sarana olahraga. Itulah sebabnya, ketika pemuka-pemuka masyarakat Islam yang sebelumnya meminta kepada otoritas Perumnas untuk membangun masjid ditolak, mereka dapat memakluminya. Penegakan hukum pun tidak menjadi optimal. Biang kerusuhan yang muncul dari pesta minum-minuman keras (tuak), perkelahian antar kelompok, tidak diberi hukuman setimpal. Bahkan mereka segera dilepaskan tanpa dikenai sanksi, sehingga menimbulkan tanda tanya masyarakat luas.

KESIMPULAN

Usman Pelly (1994) menandakan kesenjangan sosial ekonomi dan ekspresi budaya dominan ini telah menyebabkan kelompok tertentu merasa diperas dan dipinggirkan. Secara reaktif mereka menggunakan faktor-faktor etnis dan agama sebagai atribut perlawanan. Dalam kaitan ini, faktor etnis dan agama merupakan faktor kemasam, sehingga potensi konflik yang dimiliki semakin tajam dan besar. Jika kemudian kita telah memahami, bahwa ajaran setiap agama mendambakan kedamaian, kesejahteraan dan rahmat bagi alam semesta. Kemudian memahami, bahwa sesungguhnya konflik agama, dilatari oleh beberapa sebab; sosial, ekonomi, politik, budaya, maka seharusnya sudah ada upaya yang berhasil guna dan berdaya guna, paling tidak sebuah model siap pakai yang benar-benar aplikatif sampai di jajaran akar rumput (*grass-roots*) untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemahaman tentang sumber konflik agama tersebut perlu disosialisasi sampai ke

pelosok-pelosok daerah agar umat beragama, khususnya dari tataran akar rumput tadi, mengetahui bahwa sumber terjadinya konflik antara umat agama sumbernya bukan berasal dari doktrin normatif suatu agama, melainkan dari sikap keberagamaan yang kurang dewasa, sehingga mereka tidak sanggup merespon kondisi zaman yang multikultural. Tidak satupun agama yang membenarkan terjadinya kekerasan antar sesama umat beragama. Semua agama mengajarkan manusia untuk bersedia menolong sesama sebagai salah satu tugas umat beragama.

Masalahnya, bahwa kerukunan hidup antar umat beragama masih berupa wacana atau bahkan retorika pejabat birokrasi dan tokoh-tokoh agama, sehingga umat masih jauh dari hubungan-hubungan kemanusiaan yang didasari oleh rasa cinta kasih dan saling menghargai. Akibatnya, masih saja terdapat sekat-sekat pemisah antar umat beragama. Sumartono (2001) bahkan menyatakan, para pemimpin agama, pemikiran teologi dan perangkat-perangkat institusinya hanya menjadi asesoris ritualistik dan upacara-upacara agama dan kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saifuddin. 1983. *Wawasan Islam Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. Bandung: Pustaka Salman.
- Bercovitch, Jacob. 1984. *Social Conflicts and Third Parties : Strategies of Conflict Resolution*. Boulder, Colorado : Westview Press.
- Hamid, Pananrangi, 1998/1999. *Konflik Sosial di Kelurahan Bara-Barayya Selatan Kotamadya Ujung Pandang (Studi Kasus Tentang Perkelahian Kelompok)*. Ujung Pandang: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hidayat, Komarudin. 2005. *Islam Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina.
- Hijang, Pawennari, 2004.
- Hijang, Pawennari. 2006. *Pasang Ri Kajang, Membangun Desa Hutan Berwawasan Lingkungan dan Kepemimpinan Tradisional dalam Komunitas Ammatoa di Bulukumba*. Makalah. dibacakan dalam lokakarya Menggali Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sumapapua-KLH RI, Makassar 10 Agustus 2006.
- Issac Harold. 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis, Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kinseng, Rilus. A, 2013. "Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik" dalam Viktor PH Nikijuluw, Luky Adrianto, dan Nia Januarini (Penyunting). Coral Governance. Bogor: Penerbit IPB Press.
- _____, 2014. *Konflik Nelayan*. Jakarta: Kerjasama Antara Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat , Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pusata Obor Indonesia.
- Kipp, Tita Smith and Susan Rodgers, ed.. 1982. *Indonesian Religions in Transition*. Tucson: The University of Arozona Press.

- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Pararamadina
- Magnis-Suseno, Franz. 2001. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasurung, L. Fadhlán. 2012. Akar Konflik Komunal. Rubrik Sosial-Budaya Kompasiana dalam https://www.kompasiana.com/fadlan_nasurung/551721e8a333114d06b65a34/akar-konflik-sosial-komunal-di-makassar
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minang Kabau dan Mandailing*, Jakarta : LP3ES.
- Pelras, Christian. 2006. Manusia Bugis, Diterjemahkan dari Bahasa. Inggris: The Bugis oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Sani, M. Yamin, 2006. Kerawanan Sosial dan Kerukunan antar Umat Beragama (Kasus Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar. Jurnal. Dimuat dalam jurnal "Alqalam " NO. XVIII, Tahun XII, Edisi Juli-Desember 2006.
- Sumartama Th. Dkk. 2001. *Pluralisme, Konflik dan Penduduk Agama di Indonesia*, Interfidei, Yayasan Karta.